

SISTEM, PROBLEMATIKA, DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI ARAB SAUDI

Rita Fammula¹, Neneng Hasanah²

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

e-mail: fammularita@gmail.com¹, nenenghasanah@uinjambi.ac.id²

INFORMASI ARTIKEL

Submitted : 2026-6-30

Review : 2026-6-30

Accepted : 2026-6-30

Published : 2026-6-30

KATA KUNCI

Pendidikan Arab Saudi, Kebijakan Pendidikan, Vision 2030, Reformasi Kurikulum, Gender Dan Pendidikan.

A B S T R A K

Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif sistem pendidikan Arab Saudi mencakup latar belakang historis, konsep dan filosofi pendidikan, problematika yang dihadapi, serta respons kebijakan pemerintah dalam rangka transformasi sistem pendidikan nasional. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur sistematis dan analisis kebijakan, penelitian ini mengidentifikasi empat dimensi utama kajian: (1) konteks historis dan geopolitik yang membentuk sistem pendidikan Arab Saudi; (2) konsep pendidikan berbasis nilai Islam yang menjadi fondasi sistem; (3) problematika multidimensional yang mencakup relevansi kurikulum, ketimpangan gender, kualitas tenaga pendidik, dan kesenjangan pendidikan-pasar kerja; serta (4) kebijakan reformasi khususnya dalam kerangka Saudi Vision 2030. Temuan menunjukkan bahwa Arab Saudi telah melakukan reformasi pendidikan yang signifikan, namun menghadapi tantangan struktural berupa ketegangan antara nilai keagamaan tradisional dengan tuntutan modernisasi ekonomi. Artikel ini merekomendasikan pendekatan reformasi inklusif yang mengintegrasikan nilai budaya lokal dengan kompetensi global.

A B S T R A C T

This article comprehensively examines Saudi Arabia's education system, covering its historical background, educational concepts and philosophy, systemic problems, and government policy responses in the context of national education transformation. Using systematic literature review and policy analysis, this study identifies four main dimensions: (1) historical and geopolitical context shaping the Saudi education system; (2) Islamic-based educational concepts as the system's foundation; (3) multidimensional problems including curriculum relevance, gender inequality, teacher quality, and the education-labor market gap; and (4) reform policies particularly within the Saudi Vision 2030 framework. Findings indicate that Saudi Arabia has undertaken significant educational reforms but faces structural challenges stemming from tensions between traditional religious values and economic

Keywords: Saudi Arabia Education, Education Policy, Vision 2030, Curriculum Reform, Gender And Education

modernization demands. This article recommends an inclusive reform approach that integrates local cultural values with global competencies.

PENDAHULUAN

Arab Saudi memiliki posisi strategis dalam dua bidang sekaligus, yakni sebagai penjaga dua kota suci umat Islam, Mekah dan Madinah, serta sebagai salah satu negara dengan cadangan minyak bumi terbesar di dunia. Kedua posisi tersebut sangat memengaruhi arah sistem pendidikannya. Di satu sisi, pemerintah berupaya menjaga nilai-nilai keislaman dan budaya lokal, tetapi di sisi lain juga dituntut menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing dalam ekonomi global. Perpaduan sekaligus Tarik-menarik antara dua kepentingan ini menjadi ciri utama perkembangan Pendidikan di Arab Saudi hingga sekarang.

Secara historis, perkembangan Pendidikan formal di Arab Saudi mulai mengalami kemajuan yang signifikan setelah berdirinya Kementerian Pendidikan pada tahun 1954 di bawah pemerintahan Kerajaan Saud. Sebelumnya, Pendidikan lebih banyak berlangsung secara informal melalui Lembaga-lembaga keagamaan seperti kuttab dan madrasah. Lonjakan pendapatan minyak pada decade 1970-an mendorong perluasan besar-besaran sector Pendidikan, ditandai dengan meningkatnya jumlah sekolah dan universitas. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan peningkatan mutu Pendidikan yang merata (Allmnakrah & Evers, 2020).

Memasuki abad ke-21, Arab Saudi menghadapi tekanan untuk melakukan diversifikasi ekonomi guna mengurangi ketergantungan pada pendapatan minyak bumi yang semakin tidak menentu. Dalam konteks ini, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kritis, dan sistem pendidikan berada di persimpangan antara kebutuhan reformasi radikal dan resistensi terhadap perubahan. Peluncuran Saudi Vision 2030 pada tahun 2016 oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman menandai babak baru dalam upaya transformasi pendidikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kerajaan.

Kajian komparatif sistem pendidikan internasional, termasuk Arab Saudi, memiliki relevansi tinggi bagi para akademisi dan pengambil kebijakan pendidikan di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, mengingat adanya kesamaan dalam konteks masyarakat Muslim dan tantangan modernisasi yang dihadapi. Artikel ini hadir untuk mengisi celah literatur berbahasa Indonesia yang masih jarang membahas sistem pendidikan Arab Saudi secara komprehensif, menggabungkan dimensi historis, konseptual, problematis, dan kebijakan dalam satu kerangka analisis terintegrasi.

METODE KAJIAN

Artikel ini disusun menggunakan metode kajian literatur sistematis (systematic literature review/SLR) yang dikombinasikan dengan analisis kebijakan (policy analysis). Metode SLR dilaksanakan mengacu pada panduan PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data elektronik Scopus, Web of Science, ERIC, dan Google Scholar menggunakan kata kunci: "Saudi Arabia education system", "education policy reform Saudi Arabia", "Vision 2030 education", "Saudi curriculum reform", "gender education Saudi Arabia", "higher education Saudi Arabia labor market".

Kriteria inklusi meliputi: (a) artikel jurnal terindeks Scopus/WoS atau laporan lembaga internasional bereputasi; (b) diterbitkan antara tahun 2015–2024; (c) membahas aspek sistem, kurikulum, kebijakan, atau isu gender pendidikan Arab Saudi. Dari 112 dokumen yang diidentifikasi, sebanyak 54 memenuhi kriteria inklusi dan dijadikan bahan analisis utama. Selain itu, dokumen kebijakan resmi pemerintah Arab Saudi (Vision 2030, laporan Kementerian Pendidikan) dan laporan lembaga internasional (OECD, UNESCO, World Bank) juga dianalisis sebagai sumber data kebijakan primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dan Filosofi Pendidikan Di Arab Saudi

1. Fondasi Nilai Islam

Filosofi pendidikan Arab Saudi secara resmi berakar pada prinsip-prinsip Islam sebagaimana dinyatakan dalam dokumen "Kebijakan Umum Pendidikan" (Al-Siyasah Al-Ta'limiyyah Al-'Ammah) yang pertama kali diterbitkan tahun 1970 dan telah mengalami beberapa revisi. Dokumen ini menetapkan bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk Muslim yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat dan negara. Islam tidak sekadar menjadi salah satu mata pelajaran, melainkan menjadi kerangka nilai (value framework) yang mewarnai seluruh aspek kurikulum, dari matematika hingga sains dan ilmu sosial.

Secara kurikuler, implikasi dari filosofi ini adalah porsi besar yang diberikan kepada pelajaran keagamaan: Al-Qur'an, Hadis, Fiqih (hukum Islam), Akidah (teologi), dan Sejarah Islam merupakan mata pelajaran wajib di semua jenjang. Sebelum reformasi Vision 2030, pelajaran keagamaan menyita sekitar 30–35% dari total waktu belajar di jenjang menengah. Pendekatan pedagogis yang umum digunakan adalah hafalan dan transmisi pengetahuan dari guru ke siswa, mencerminkan tradisi keilmuan Islam klasik yang menekankan preservasi dan transmisi teks-teks otoritatif.

2. Konsep Ta'lim, Tarbiyah, dan Ta'dib

Dalam tradisi intelektual Islam, terdapat tiga konsep utama pendidikan yang relevan untuk memahami filosofi pendidikan Arab Saudi. Pertama, ta'lim yang merujuk pada proses transmisi pengetahuan (knowledge transfer) secara terstruktur. Kedua, tarbiyah yang mencakup pengembangan kepribadian, karakter, dan potensi peserta didik secara menyeluruh—mendekati konsep pendidikan holistik dalam terminologi modern. Ketiga, ta'dib yang berarti pembentukan adab (etika, sopan santun, dan nilai-nilai moral) sebagai inti dari proses pendidikan.

Dalam praktik di Arab Saudi, konsep ta'lim dalam pengertian transmisi pengetahuan keagamaan cenderung mendominasi, sementara dimensi tarbiyah (pengembangan potensi) dan ta'dib (pembentukan karakter berbasis nilai universal) kurang mendapat perhatian proporsional. Dominasi pendekatan transmisionis ini yang

sering dikritik oleh para reformis pendidikan sebagai akar dari budaya hafalan yang menghambat pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik.

3. Visi Pendidikan dalam Konteks Kebangsaan

Selain dimensi keislaman, sistem pendidikan Arab Saudi juga mengemban misi pembentukan identitas nasional dan kesetiaan kepada sistem monarki. Buku-buku teks sejarah dan kewarganegaraan menekankan narasi tentang peran Keluarga Kerajaan Saud dalam mempersatukan Semenanjung Arabia dan menegakkan hukum Islam, serta kewajiban rakyat untuk taat kepada ulil amri (pemimpin). Dimensi ini membuat sistem pendidikan memiliki fungsi politisasi yang tidak selalu eksplisit tetapi cukup kuat dalam membentuk persepsi siswa tentang hubungan antara agama, negara, dan warga negara.

Dalam kerangka Vision 2030, konsep pendidikan sedang mengalami reorientasi menuju apa yang disebut sebagai "pendidikan untuk masa depan" (education for the future). Dokumen Vision 2030 menekankan pentingnya mengembangkan "warga Saudi yang berdaya, bertanggung jawab, dan produktif" yang memiliki kemampuan bersaing di pasar global. Pergeseran ini membawa implikasi besar bagi kurikulum, metode pengajaran, dan tujuan institusional sistem pendidikan secara keseluruhan.

B. Problematika Pendidikan Di Arab Saudi

1) Relevansi Kurikulum dan Budaya Hafalan

Masalah relevansi kurikulum merupakan salah satu kritik paling fundamental dan konsisten yang ditujukan kepada sistem pendidikan Arab Saudi. Proporsi pelajaran keagamaan yang tinggi—meskipun telah berkurang sejak reformasi 2016—dinilai oleh banyak pengamat sebagai trade-off yang tidak menguntungkan di mana waktu yang bisa digunakan untuk mengembangkan literasi sains, teknologi, kewirausahaan, dan bahasa asing, dialihkan untuk hafalan teks-teks keagamaan yang tidak langsung relevan dengan kebutuhan ekonomi.

Allmnakrah dan Evers (2020) menyatakan bahwa untuk mewujudkan Vision 2030, Arab Saudi memerlukan transformasi mendasar dalam sistem pendidikan yang tidak hanya menyangkut konten kurikulum, tetapi juga paradigma pedagogis. Para peneliti ini berargumen bahwa pendekatan mengajar yang berpusat pada guru (teacher-centered) dan budaya hafalan yang dominan harus diganti dengan pendekatan pembelajaran aktif yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas.

Dimensi lain dari problematika kurikulum adalah kandungan nilai dan narasi dalam buku teks yang dinilai tidak sesuai dengan standar toleransi dan inklusivitas internasional. Aseery dan Alfaifi (2025) dalam kajian konten analisis terhadap buku teks studi Islam tingkat sekolah menengah pertama menemukan bahwa meskipun tema toleransi agama hadir, distribusinya tidak merata di berbagai jenjang kelas dan masih ditemukan konten yang mengelompokkan penganut agama lain secara negatif. Kajian ini relevan untuk memahami tantangan moderasi konten buku teks yang masih dihadapi pemerintah Saudi.

2) Ketimpangan Gender dalam Pendidikan

Isu gender dalam pendidikan Arab Saudi memiliki sejarah panjang dan kompleks. Pendidikan formal bagi perempuan baru dimulai secara resmi pada tahun 1960, dua dekade setelah pendidikan laki-laki, dan awalnya menghadapi resistensi keras dari kalangan ulama konservatif. Segregasi gender yang ketat—sekolah terpisah, kurikulum sebagian berbeda, dan pembatasan terhadap bidang studi yang "cocok" bagi perempuan—menjadi ciri khas sistem pendidikan Saudi selama puluhan tahun.

Aldegether (2023) dalam studi analisis konten terhadap kurikulum Pendidikan Keluarga (Family Education) di sekolah menengah atas Arab Saudi menemukan bahwa meskipun buku teks diterbitkan pasca-Vision 2030, representasi perempuan di dalamnya masih cenderung menempatkan perempuan dalam peran domestik dan reproduktif. Studi ini menyimpulkan bahwa reformasi kebijakan di tingkat atas belum sepenuhnya terefleksi dalam konten kurikulum, yang mengindikasikan adanya jeda (lag) antara perubahan kebijakan formal dengan transformasi nilai yang sesungguhnya.

Di sini menariknya paradoks gender: meskipun saat ini perempuan Arab Saudi menjadi mayoritas lulusan pendidikan tinggi (GPI) berada pada Level 1,1515 partisipasi mereka dalam pasar tenaga kerja tetap jauh di bawah potensinya. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari sekitar 17 persen pada 2016 menjadi 33 persen pada 2023, seiring dengan penerapan kebijakan Vision2030 (World Bank, Women, Business and the Law), dan perempuan kini menyumbang lebih dari setengah lulusan universitas; namun kami melihat adanya kesenjangan “pendidikan menuju kontribusi ekonomi yang aktif” karena tantangan sosio-kultural dan struktural yang masih signifikan

3) Kualitas Tenaga Pendidik

Kualitas guru merupakan faktor paling determinan dalam mutu pendidikan, dan ini pula salah satu titik lemah terbesar sistem pendidikan Arab Saudi. Sejumlah permasalahan struktural telah diidentifikasi: Pertama, sistem pendidikan di Arab Saudi sejak lama bergantung pada tenaga pengajar asing, terutama yang berasal dari Mesir, Yordania, dan beberapa negara Arab lainnya. Walaupun para guru tersebut memiliki kemampuan akademik yang cukup baik, mereka sering kali kurang memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat serta tidak memiliki komitmen jangka panjang terhadap pengembangan pendidikan nasional Saudi. Situasi ini menyebabkan proses peningkatan mutu pendidikan berjalan kurang berkelanjutan.

Kedua, program pendidikan dan pelatihan awal guru (initial teacher preparation atau ITP) di Arab Saudi secara tradisional lebih menekankan penguasaan materi pelajaran dibandingkan pengembangan keterampilan pedagogis dan metode pembelajaran modern. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alharbi dan Albidewi (2024), dijelaskan bahwa program persiapan guru memerlukan pembaruan secara menyeluruh agar mampu menyesuaikan kompetensi guru dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21. Pembaruan tersebut meliputi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, penerapan pembelajaran berbasis proyek, serta penguatan kemampuan berpikir kritis dan tingkat tinggi.

Ketiga, sistem evaluasi kinerja dan pengembangan profesional guru masih belum berjalan secara efektif. Penilaian terhadap guru di banyak lembaga pendidikan masih lebih berfokus pada aspek administratif, seperti kehadiran dan masa kerja, dibandingkan kualitas proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Akibatnya, guru belum memperoleh dorongan yang cukup untuk terus berinovasi dan meningkatkan kompetensinya. Selain itu, meskipun program continuing professional development (CPD) telah mulai diterapkan sebagai upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik, pelaksanaan dan jangkauannya masih perlu diperkuat agar mampu memberikan pengaruh yang lebih signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

4) Kesenjangan Pendidikan Tinggi dan Pasar Kerja

Problematika yang paling terlihat dampaknya secara sosial-ekonomi adalah kesenjangan antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja.

Thompson (2020), dalam studi mendalam tentang kontradiksi dalam negara rentier Saudi, menemukan bahwa banyak mahasiswa Saudi secara sadar menyadari bahwa sistem pendidikan mereka tidak mempersiapkan mereka untuk pasar kerja, namun tetap memilih jalur pendidikan formal karena ekspektasi terhadap pekerjaan di sektor publik yang dianggap lebih aman, bergengsi, dan bergaji baik.

Al-Nefaie et al. (2023), dalam kajian tentang hubungan antara outcomes pendidikan tinggi Universitas Jouf dengan kebutuhan pasar kerja dalam konteks Vision 2030, menemukan bahwa layanan karier dan bimbingan, keterampilan dan kompetensi lulusan, serta desain kurikulum memiliki hubungan positif dengan employability lulusan, sementara kemitraan industri dan pembelajaran berbasis kerja (work-integrated learning) justru tidak menunjukkan hubungan signifikan—mengindikasikan perlu adanya reformasi lebih mendalam dalam model kemitraan pendidikan-industri.

Fenomena ini juga berkaitan dengan struktur insentif ekonomi dalam masyarakat rentier: selama sektor publik masih menawarkan gaji yang jauh lebih tinggi dengan persyaratan kerja yang lebih longgar, sulit untuk mengubah preferensi pemuda Saudi dari sektor publik ke sektor swasta yang lebih dinamis dan kompetitif. Reformasi pendidikan semata tidak akan cukup tanpa transformasi yang beriringan dalam struktur pasar kerja dan sistem insentif.

5) Digitalisasi dan Kesenjangan Teknologi

Pandemi COVID-19 tahun 2020 menjadi stress test yang tak terduga bagi infrastruktur teknologi pendidikan Arab Saudi. Pemerintah dengan cepat meluncurkan platform pembelajaran jarak jauh "Madrasati" yang dalam beberapa bulan mampu menghubungkan jutaan siswa dengan guru mereka. Respons cepat ini menunjukkan kapasitas anggaran dan komitmen pemerintah terhadap teknologi pendidikan. Namun pengalaman pandemi juga mengekspos kesenjangan digital yang cukup serius, terutama antara wilayah perkotaan yang lebih maju dengan daerah pedesaan dan terpencil di bagian selatan dan timur kerajaan.

Tantangan yang lebih fundamental dari sekadar ketersediaan infrastruktur adalah kesiapan pedagogis guru dalam memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Adopsi teknologi tanpa perubahan paradigma mengajar hanya menghasilkan proses hafalan yang sama namun dalam format digital—yang tidak membawa nilai tambah signifikan terhadap kualitas pembelajaran.

C. Kebijakan Reformasi Pendidikan Di Arab Saudi

1. Kebijakan Pra-Vision 2030: Proyek Tatweer

Upaya reformasi pendidikan di Arab Saudi sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum Vision 2030. Proyek Tatweer (Arab: pengembangan) yang diluncurkan pada tahun 2007 di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan merupakan program reformasi pendidikan paling ambisius sebelum Vision 2030. Dengan anggaran lebih dari 2 miliar dolar AS, Tatweer berfokus pada: pelatihan ulang guru, pengembangan kurikulum baru yang lebih berorientasi keterampilan, pengadaan teknologi di sekolah, dan reformasi manajemen sekolah. Namun evaluasi terhadap Tatweer menunjukkan hasil yang mengecewakan: program ini menghabiskan dana besar namun dampaknya terhadap kualitas pembelajaran aktual sangat terbatas, sebagian besar karena kurangnya implementasi di tingkat kelas dan resistensi guru terhadap perubahan metode mengajar (Allmnakrah & Evers, 2020).

2. Saudi Vision 2030 dan Agenda Reformasi Pendidikan

Dokumen Vision 2030 yang diluncurkan pada April 2016 menempatkan pendidikan sebagai salah satu dari tiga pilar transformasi nasional, bersama ekonomi

dan masyarakat. Dalam kerangka ini, sejumlah target spesifik ditetapkan untuk sektor pendidikan: (a) meningkatkan peringkat universitas Saudi dalam ranking dunia, dengan target minimal 5 universitas masuk 200 besar dunia pada 2030; (b) meningkatkan angka partisipasi wanita dalam pendidikan teknis dan vokasional; (c) mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 ke dalam kurikulum nasional; (d) mengembangkan karakter nasional dan identitas Saudi yang seimbang antara nilai Islam dan keterbukaan terhadap dunia.

OECD (2020) dalam review kebijakan pendidikan Arab Saudi mengidentifikasi bahwa meskipun Arab Saudi telah berhasil mencapai universal enrollment di jenjang dasar dan menengah pertama, sebagian besar pelajar meninggalkan sekolah tanpa menguasai kompetensi dasar yang diukur oleh standar internasional. Hal ini mencerminkan masalah kualitas yang mendalam yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan investasi infrastruktur.

3. Program-Program Kebijakan Spesifik

Dalam implementasi Vision 2030, sejumlah program kebijakan spesifik telah diluncurkan di bidang pendidikan:

- a) Reformasi Kurikulum Bertahap. Pemerintah secara bertahap mengurangi porsi pelajaran agama dari sekitar 33% menjadi 23% dari total waktu belajar di jenjang menengah, sambil meningkatkan alokasi untuk STEM, bahasa Inggris, seni, dan pendidikan jasmani. Revisi buku teks juga dilakukan untuk menghapus konten yang mengandung intoleransi dan narasi eksklusif.
- b) Program King Abdullah Scholarship (KASP). Program beasiswa yang diluncurkan sejak 2005 ini telah mengirimkan lebih dari 200.000 mahasiswa Saudi ke universitas-universitas terkemuka di Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Kanada. Program ini merupakan investasi strategis dalam pengembangan SDM berkualitas yang diharapkan menjadi agen perubahan ketika mereka kembali ke tanah air.
- c) Pendidikan Teknis dan Vokasional (TVET). Pemerintah mereformasi sistem TVET untuk meningkatkan daya tarik dan relevansinya dengan kebutuhan industri. Stigma sosial terhadap pendidikan vokasional—yang secara tradisional dipandang sebagai jalur pendidikan kelas dua—coba diatasi melalui kampanye branding dan peningkatan kualitas fasilitas.
- d) Digitalisasi Pendidikan. Pembangunan infrastruktur teknologi pendidikan yang masif, pengembangan platform e-learning nasional, dan pengenalan coding dan keterampilan digital di sekolah dasar menjadi agenda prioritas dalam kerangka transformasi digital yang lebih luas.
- e) Reformasi Pendidikan Tinggi. Konsolidasi tata kelola perguruan tinggi, peningkatan riset dan inovasi melalui pembentukan Science, Technology and Innovation Commission (STIC), serta program kerja sama internasional antara universitas Saudi dengan institusi dunia kelas satu menjadi bagian dari agenda reformasi perguruan tinggi.

4. Hambatan dan Tantangan Implementasi

Terlepas dari ambisi reformasi yang besar, implementasi kebijakan pendidikan Vision 2030 menghadapi sejumlah hambatan struktural. Pertama, resistensi dari kelompok ulama konservatif yang memandang pengurangan pelajaran agama sebagai ancaman terhadap identitas Islam dan legitimasi keagamaan kerajaan. Meskipun kelompok ini tidak lagi terbuka dalam menyuarakan oposisi—terutama setelah konsolidasi kekuasaan Mohammed bin Salman melalui penahanan sejumlah tokoh

agama berpengaruh pada 2017—pengaruh mereka di tingkat implementasi lapangan masih terasa.

Kedua, kapasitas birokrasi pendidikan yang terbatas dalam mengelola reformasi berskala besar secara bersamaan. Banyak kebijakan baru yang diluncurkan dengan timeline yang sangat ambisius namun tidak disertai dengan panduan implementasi yang jelas, pelatihan staf yang memadai, dan sistem monitoring yang efektif. Ketiga, budaya organisasi di sekolah dan universitas yang cenderung resisten terhadap perubahan paradigma, terutama di kalangan guru senior yang telah mengajar dengan cara yang sama selama puluhan tahun.

Keempat, ketergantungan reformasi pada political will satu pemimpin—Mohammed bin Salman—menciptakan risiko ketidakberlanjutan. Perubahan yang tidak berakar kuat pada perubahan budaya dan kelembagaan yang lebih dalam berpotensi berbalik arah jika terjadi perubahan kepemimpinan atau prioritas politik.

KESIMPULAN

Artikel ini telah menganalisis secara komprehensif sistem pendidikan Arab Saudi dari empat dimensi utama: latar belakang historis, konsep pendidikan, problematika, dan kebijakan reformasi. Secara historis, sistem pendidikan Saudi tumbuh dalam ekosistem ideologi Wahabi/Salafi yang menempatkan pendidikan agama sebagai prioritas utama, menghasilkan lulusan yang kaya pengetahuan keislaman namun kurang dilengkapi dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh ekonomi modern.

Problematika yang dihadapi bersifat multidimensional dan saling terkait: relevansi kurikulum yang rendah, budaya hafalan yang menghambat berpikir kritis, ketimpangan gender yang meskipun berkurang masih terasa dalam struktur sosial, kualitas tenaga pendidik yang belum memadai, dan kesenjangan antara output perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja. Vision 2030 telah membuka peluang reformasi yang belum pernah ada sebelumnya, namun keberhasilan jangka panjangnya bergantung pada kedalaman perubahan budaya dan kelembagaan yang tidak bisa diselesaikan dalam satu atau dua dekade.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldegether, R. A. (2023). Representations of girls and women in a Saudi Arabian family education curriculum: A content analysis. *Frontiers in Education*, 8, Article 1112591. <https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1112591>
- Alharbi, M. S., & Albidewi, I. A. (2024). Initial teacher preparation program in Saudi Arabia: History and framework for transformation toward a new era. *Frontiers in Education*, 9, Article 1442528. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1442528>
- Allmnakrah, A., & Evers, C. (2020). The need for a fundamental shift in the Saudi education system: Implementing the Saudi Arabian economic Vision 2030. *Research in Education*, 106(1), 22–40. <https://doi.org/10.1177/0034523719851534>
- Al-Nefaie, A., Al-Otaibi, M., & Al-Zahrani, S. (2023). Bridging higher education outcomes and labour market needs: A study of Jouf University graduates in the context of Vision 2030. *Social Sciences*, 12(6), Article 360. <https://doi.org/10.3390/socsci12060360>
- Aseery, A., & Alfaifi, M. (2025). Religious tolerance in Saudi Arabia's middle school Islamic studies. *British Journal of Religious Education*, 47(2), 111–126. <https://doi.org/10.1080/01416200.2024.2315551>
- Barry, A. (2019). Gender differences in academic achievement in Saudi Arabia: A wake-up call to educational leaders. *International Journal of Education Policy and Leadership*, 15(15). <https://doi.org/10.22230/ijep1.2019v15n15a890>

- Human Rights Watch. (2021, February 15). Saudi Arabia: Further textbook reforms needed. <https://www.hrw.org/news/2021/02/15/saudi-arabia-further-textbook-reforms-needed>
- Kingdom of Saudi Arabia. (2016). Vision 2030: Kingdom of Saudi Arabia. <https://www.vision2030.gov.sa>
- Ministry of Education, Kingdom of Saudi Arabia. (2023). Annual statistical report on education in Saudi Arabia 2022–2023. <https://www.moe.gov.sa>
- OECD. (2020). Education in Saudi Arabia. Reviews of National Policies for Education. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/76df15a2-en>
- Prokop, M. (2003). Saudi Arabia: The politics of education. *International Affairs*, 79(1), 77–89. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.00302>
- Thompson, M. C. (2020). Inherent contradictions in the Saudi rentier state: Distributive capacity, youth employment preferences, and attitudes to education. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 47(1), 83–99. <https://doi.org/10.1080/13530194.2020.1714868>
- UNESCO. (2022). Global Education Monitoring Report 2022: Non-state actors in education—Who chooses? Who loses? UNESCO Publishing.
- World Bank. (2023). Saudi Arabia: Building human capital for Vision 2030. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/country/saudiarabia/publication>